



*Journal of NTT Studies*

1 (1) (2009) 51-62

ISSN: 20856504

**Journal of  
NTT  
Studies**

**Open Access**

## Orang NTT Menulis Tentang Dunia

Dominggus Elcid Li<sup>(a,b)</sup>


(a) Sociology Department, University of Birmingham

(b) Institute of Indonesia Tenggara Studies, Indonesia

(Received 24 May 2008; final version received 30 May 2009)

Email: [elcidli@yahoo.com](mailto:elcidli@yahoo.com)

Permanent link of this article: <http://ntt-academia.org/nttstudies/Elcid2009.pdf>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode>) License: 

Selama ini perspektif yang berkembang ketika orang menulis soal NTT atau era sebelumnya perspektif yang diambil selalu diambil dari pusat, Jakarta. NTT disebut sebagai Provinsi Republik Indonesia sejak tahun 1958.<sup>1</sup> Kondisi sebelum 1958, sering dianggap tidak ada. Padahal untuk memahami kondisi sekarang, kita perlu memahami kondisi sebelumnya. Sehingga untuk bisa berbicara tentang 50 tahun NTT, sama artinya diminta untuk memahami proses ‘peng-ada-an’ NTT beserta sejarahnya yang dilakukan di ruang tulis-menulis para academia.

Hingga tahun 1942, daerah ini disebut *De Resident van Timor en Onderhorigheden* (Keresidenan Timor dan Daerah-daerah sekitarnya) dan koordinasi pemerintahan di wilayah ini dilakukan dari Batavia (Jakarta). Selama Perang Dunia Kedua, wilayah ini

<sup>1</sup> NTT sendiri adalah akronim baru. Sembilan tahun pasca transfer kedaulatan dari Kerajaan Belanda, baru Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk. Tepatnya tanggal 15 Desember 1958. Proses desentralisasi ini terjadi tiga tahun setelah demokrasi liberal yang dilaksanakan di Indonesia dinyatakan ‘kacau’ dan diambil alih oleh Presiden Sukarno dengan Demokrasi Terpimpin dengan menggandeng PKI maupun TNI (AD) sebagai dua pilar utama. Proses desentralisasi yang pernah dibahas Belanda di tahun 1920, baru dilanjutkan di tahun 1958 dengan membagi wilayah yang semula dikenal sebagai Sunda Kecil menjadi tiga Provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tahun 1965 era Sukarno berakhir. Sejumlah kuburan massal hingga kini tak pernah ditulis ulang sejarahnya. Trauma ini tidak pernah terjelaskan. Jangankan orang di NTT, para ahli strategi ulung Republik Indonesia pun tak mampu menemukan jalan keluar di dalam labirin sejarah Republik Indonesia yang pintunya telah dibuang, seiring perubahan konstelasi politik dunia

ada di bawah pendudukan Jepang. Di masa transisi dan negosiasi ke dalam Republik Indonesia, pemerintahan di Timor ada di bawah *Timor Eiland Federatie* (Federasi Raja-Raja Timor). Dalam negosiasi pembentukan negara di Jakarta penduduk di wilayah ini ada di bawah payung Negara Indonesia Timur (NIT) dan selanjutnya nanti dikoordinir dalam wilayah Sunda Kecil.<sup>2</sup>

Terkait dengan NIT, debat pembentukan negara kesatuan hingga belum dibuka untuk melihat argumentasi-argumentasi yang mewakili pikiran Sutan Sjahrir maupun Soepomo, tentang bagaimana eks daerah di bawah Hindia Belanda harus diperintah oleh kaum *Bumi Putera*. Sebutan *Bumi Putera* untuk menyebut berakhirnya subordinasi rasial (pembedaan manusia berdasarkan warna pigmen) yang menandai berakhirnya kolonialisme.

Sedangkan kajian *post-colonial* yang membahas tentang ‘kolonialisme internal’ di Republik Indonesia masih lah merupakan wacana baru atau pinggiran. Contohnya usaha untuk membuka kembali debat soal ‘federalisme’ yang terjadi pasca turunnya Presiden Soeharto, cenderung beralih dari substansi persoalan, dan hanya terjebak pada label. Kritik terhadap struktur pemerintahan-politik yang sentralistik melahirkan kebijakan ‘otonomi daerah’, tanpa kejelasan pembagian sistem politik di negeri ribuan pulau ini. Saat ini otonomi daerah lebih dilihat sebagai strategi pembukaan hambatan-hambatan investasi, tanpa emansipasi politik warga negara.

Carut-marut sistem politik ini terbaca jelas dalam kompromi politik di Helsinki untuk mewisadahi konflik pusat-daerah, di Aceh. Keputusan itu memang memberikan ‘rasa damai’ tetapi tidak menyelesaikan konflik dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang sejarahnya bisa dilihat sebelum tahun 1949, tahun penyerahan kedaulatan. Sehingga seharusnya pikiran negarawan dari pinggir saat ini diperlukan untuk menyelesaikan dilema di dalam Republik Indonesia. Berdasarkan alasan ini kajian-kajian dari pinggiran Republik Indonesia harus lah digalakan, dan untuk itu pula Jurnal *Academia NTT* dihadirkan.

Pasca kolonial, selama ini di era Republik pun, para pejabat pemerintahan moderen Indonesia tetap amat jarang mau menulis dengan menggunakan perspektif sendiri. Untuk melihat diri sendiri, Orang NTT selalu merasa perlu menggunakan standar dari Jakarta. Proyek modernisasi yang dimengerti Jakarta pun jarang yang mampu melihat dan menempatkan ‘diri sendiri’ sebagai manusia. Manusia ideal yang dilihat ‘pejabat Jakarta’ bukan lah rakyat kebanyakan. Gambaran kolonial tentang manusia ideal masih melekat dalam ‘pejabat Jakarta’ hingga saat ini. Hal yang sama direproduksi oleh intelektual Indonesia dalam proyek modernisasi.

### **Tantangan *Academia NTT***

---

<sup>2</sup> Hingga kini kajian yang membahas soal periode ini masih amat minim. Cara penulisan sejarah masih lah Jakartasentris. Penulisan sejarah lokal di wilayah ini cenderung terlupakan. Padahal persoalan politik Indonesia di tahun 2009, tidak pernah lepas dari dialog yang dimulai kaum-kaum intelektual yang merupakan produk dari ‘politik etis’. Ketidakmampuan untuk memahami ‘warna’ Indonesia terkini tidak memungkinkan warga dari NTT untuk berdialog dalam bingkai Indonesia. Dalam iklim demokrasi liberal saat ini, penjelajahan ide tentang pembentukan Republik Indonesia, perlu dilakukan dari NTT.

Tinggal di daerah minus dalam kacamata ekonomi membuat Academia NTT harus berpikir lebih keras untuk mencari jalan keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi. Selama ini struktur kelas menengah di NTT diwakili oleh keluarga pamong praja atau pegawai negeri sipil maupun sedikit pengusaha yang umumnya merupakan distributor barang. Sedangkan sektor produksi sudah lama tidak dibangun. Ini membuat lulusan perguruan tinggi umumnya berlomba menjadi PNS, atau pegawai organisasi non pemerintah.<sup>3</sup>

Minimnya lapangan kerja dan siklus kemiskinan yang belum menemukan jalan keluar membuat sejumlah lembaga internasional lebih dari satu dekade terakhir ikut membantu bekerja. Di sisi ini, para sarjana pun mendapatkan peluang kerja. Tetapi, di saat yang sama krisis ekonomi global tidak memberikan jaminan bahwa bantuan yang diterima saat ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Sehingga seharusnya para Academia NTT yang terserap di sektor ini mau ikut mencari jalan keluar untuk mencari kemungkinan lain untuk bertahan hidup bersama-sama.

Jika selama ini pelaksanaan program hanya berpatok pada manual program dari lembaga asal, maka para Academia dituntut untuk berpikir mandiri, dan melihat di mana peluang untuk memotong rantai kemiskinan ini. Pengalaman lapangan selama bertahun-tahun seharusnya mampu 'diteorikan' untuk menjadi ilmu bagi kita untuk bertahan hidup. Ini jelas satu alasan mengapa Jurnal Academia NTT menjadi penting keberadaannya. Karena Jurnal Academia NTT menjadi tempat berbagi 'ilmu lapangan'.

Kerja keras ini perlu kita lakukan sambil mengingat bahwa pencapaian Orde Baru di NTT ditandai dengan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok daerah, juga perlahan mulai menguap. Semasa kepemimpinan Soeharto pembangunan fisik yang diutamakan. Ini berdampak pada hasil evaluasi pemerintahan. Di kalangan pemimpin daerah tidak banyak ulasan sejarah maupun analisis sosial dalam kacamata seorang negarawan.

Kebiasaan menuliskan memori pemerintahan di era Republik, masih tak sebaik para administratur Belanda yang berusaha menuliskan tentang kerja mereka selama di *Karesidenan Timor*. Pelatihan untuk menjadi indolog sebelum warga Belanda diturunkan untuk memerintah di Hindia Belanda membantu mereka untuk berpikir sistematis, sekaligus melakukan akumulasi pengetahuan tentang 'obyek jajahan'.

Contohnya, jika Nordholt bekas Residen Timor mampu menulis sebuah penelitian antropologis tentang 'dunia orang Dawan', maka jelas tak sebanding dengan para Gubernur NTT di era Republik yang memori pemerintahannya didominasi tentang hal 'apa saja yang sudah dibangun'. Mulai dari jalan raya, jembatan, gedung sekolah, hingga Puskesmas. Sedangkan pemahaman tentang manusia di NTT biasanya tak diperhitungkan. Ini agak aneh, sebab jika Nordholt merasa perlu belajar soal manusia

---

<sup>3</sup> Sebutan ornop lebih dipilih daripada LSM, karena sistem pembiayaan LSM tidak swadaya. Krisis ekonomi yang sudah diawali di Asia di tahun 1997, dan diperkuat di wilayah Eropa dan AS di tahun 2008 cepat atau lambat akan memberi dampak pada LSM yang dananya tergantung pada donasi negara-negara Utara, khususnya terhadap proyek-proyek sosial yang aktif dijalankan di Asia dan Afrika.

tempatnyanya memerintah, tapi di era Republik para aparat negara merasa tidak perlu mempelajari manusia yang tinggal di wilayah pemerintahannya. Karena bisa dipertanyakan 'aktivitas pembangunan yang sedang dilakukan itu untuk siapa'.

Proyek modernitas yang diusung pemerintah daerah, investor dan aktivis organisasi non pemerintah (lokal maupun internasional) tetap tiba di satu titik yang melihat manusia adalah makhluk yang universal, dan gambaran idealnya pun adalah tunggal. Ruang dalam manusia ideal itu masih agak jauh untuk dikaji. Hanya sedikit Orang NTT yang bertandang ke 'pusat peradaban' dan tak banyak pula yang ingin mencoba melihat kembali 'ruang dalam' nenek moyang usai berjalan jauh.

Proyek modernitas yang dimotori pemerintah maupun ornop, melupakan manusia yang tinggal di wilayah ini. Di era otonomi daerah para bupati seringkali bersengketa dengan warga setempat karena mengizinkan investor tambang beroperasi di tanah ulayat yang merupakan ladang hidup. Konflik yang berkembang biasanya salah kaprah di tangan para bupati. Warga yang menentang dianggap menentang pembangunan. Padahal otonomi daerah tanpa di-ikuti dengan emansipasi maupun partisipasi politik bagi warga negara, tidak memberikan peluang bagi warga negara untuk bersuara menentukan ke mana negara akan pergi. Ditambah dengan dominasi investor maka suara warga biasa hampir tak terdengar, dan seringkali diperlakukan sebagai kriminal.

Kompleksnya persoalan ini menuntut kita untuk setia bekerja dan menganalisis. Tetapi telah menjadi cerita lama bahwa minimnya kebiasaan menulis dan menganalisis persoalan bukan hanya milik para birokrat, tetapi para aktivis ornop yang aktif dalam berbagai komunitas di lingkaran bawah. Contoh yang paling sederhana misalnya tentang kajian 'busung lapar'. Tidak banyak kajian yang sudah dibukukan, mengenai 'busung lapar'. Sekian ornop bergerak mengkaji isu ini tetapi hanya dalam kerangka *emergency action* atau serba darurat. Sedangkan analisis sosialnya amat minim.

### **Jalan buntu**

Sedangkan secara geopolitik dalam penentuan bentuk kenegaraan, warga Nusa Tenggara Timur merupakan elemen Negara Indonesia Timur (NIT). Ide negara federal yang diusung NIT dihentikan sebagai bentuk protes terhadap agresi militer Belanda II. Kenyataannya 'kolonialisme internal' yang terjadi di era Republik Indonesia hingga belum lagi mendapatkan cara untuk menyelesaikannya.

Wilayah NTT yang meliputi lima pulau besar: Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata dalam sejarah kolonial berada dalam pengaruh Portugis maupun Belanda. Selama kehadiran penguasa kolonial, wilayah NTT kental dengan *missie* dan *zending* di era Belanda, maupun sudah dimulai oleh *Padre* Dominikan di era Portugis di Larantuka dan sekitarnya. Sedangkan *Syiar* Islam sudah terjadi sebelumnya di Solor dan Pantar, yang merupakan jalur dagang lama yang terhubung ke daerah Ternate dan Tidore.

Selain dari itu warga di Kepulauan NTT ini menganut agamanya sendiri yang memang tidak mewakili budaya tulis. Hingga kini komunitas-komunitas ada ini masih tersebar dan masih bisa belum dimengerti oleh kaum yang mampu membaca-menulis dari NTT.

Komunitas-komunitas adat ini malah menjadi asing di tanahnya sendiri. Usaha untuk mengerti dengan baik malah dilakukan oleh para antropolog, pastor dan pendeta dengan latar belakang antropologi, maupun sejumlah indolog di era Belanda sebagai pelopornya.

Keterasingan para 'kaum terdidik NTT' ini implikasinya mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Wajah 'manusia kampung' asal para kaum urban NTT sering ditulis sebagai terbelakang tanpa keinginan lebih jauh untuk meletakkan mereka dalam pertemuan sebagai manusia.

### **'Orang Kerja vs Tukang Omong'**

Dalam hidup sehari-hari masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) biasa orang menyebut Si A sebagai 'orang kerja' dan Si B sebagai 'tukang omong' untuk membedakan karakter orang yang 'melakukan' sesuatu dan orang yang 'menyatakan akan melakukan sesuatu'.

Idiom serupa juga melekat di kalangan anak-anak dengan situasi yang berbeda. 'Anak *karja*' (kerja) dibedakan dengan 'anak sekolah'. Idiom 'anak karja' mewakili anak-anak yang tidak beruntung dan mencari hidup di kota-kota besar di NTT, umumnya mereka berasal dari pedalaman. Sekolah bukan lah tepat yang tepat untuk hidup. Angka siswa yang meninggalkan sekolah dari pedalaman jarang tercatat. Bagi anak-anak yang ada dalam golongan anak kerja, sekolah tidak menjajikan hidup. Pelajaran tidak bertautan dengan hidup. Sedangkan 'anak sekolah' adalah ungkapan untuk menyebut mereka yang lebih berada yang masih ada dalam jalur sekolah.

Sehingga jika warga NTT yang biasa bertemu dalam Forum Academia NTT menginisiasi sebuah Jurnal, tentu pertanyaan ini menggelinding terbuka. Akankah Jurnal ini memberi jawaban terhadap dua hal yang teramat biasa dalam hidup kita? Apakah mereka yang bersekolah itu identik dengan tukang omong, dan bukan orang kerja. Juga untuk membuktikan apakah mereka yang dulu dan masih jadi 'anak sekolah' tidak mendiamkan kawan-kawannya yang tergolong dalam 'anak *karja*'.

Kaum yang mampu membaca dan menulis identik sebagai kumpulan orang yang banyak bicara dan tidak membumi. Kritik yang sama disampaikan oleh anak-anak sekolah di pedalaman yang memandang sekolah-sekolah yang ada tidak terkait dengan kenyataan yang ada dalam ruang hidup mereka.

Keterpisahan ilmu dan kenyataan belum dibahas cukup serius dalam masyarakat NTT. Ilmu masih lah dilihat sebagai barang impor, barang asing. Kaum baca tulis masih melihat hanya dari satu sisi. Barang siapa tidak memiliki kemampuan membaca menulis ia dianggap terbelakang, dan harus taat untuk diatur. Di sisi ini proyek emansipasi yang digagas dan menjadi ide utama dalam perjuangan kemerdekaan memang terasa utopis, di satu sisi mengecam subordinasi rasial tetapi di sisi lain menindas dengan alasan lain.

### **Mengapa NTT?**

Pilihan untuk lebih membahas wilayah seluas Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan usaha untuk menjawab panggilan hidup. Tindakan 'meminta' mungkin sudah cukup

dilakukan. Tindakan memprotes juga sudah cukup dilakukan. Kini tiba saatnya untuk berusaha bekerja dan berjuang untuk hidup. Ilmu harus lah bisa dipakai untuk hidup.

Dengan menyebut kawasan NTT sebagai fokus ruang geraknya dengan sendirinya orang mudah tergelincir untuk menyebut sebagai bentuk primordialisme. Namun ungkapan-ungkapan semacam ini hanya ada di tataran retorika semata. Persoalan pemahaman ruang memang masih menjadi bagian yang tidak diamati dengan jeli oleh Orang Indonesia. Menyebut Indonesia seolah identik dengan Jakarta. Padahal dengan ribuan pulauanya mau tak mau usaha menurunkan kerja membangun Indonesia perlu dilakukan dengan lebih mendetil. Bukan cuma sibuk menunjuk hidung pada Presiden ketika ada ketidakberesan atau ketidakmampuan menuntaskan persoalan.

Ketidakmampuan para academia untuk menganalisis apa yang sedang terjadi, membuat membuat intelektual Indonesia terkenal banyak bicara, tetapi tidak banyak bekerja. Kaum intelektual dikenal menikmati hak istimewa untuk tidak bekerja. Lebih rela menghabiskan waktu untuk bertukar kata-kata. Ini menjadi tantangan para Academia NTT untuk menurunkannya menjadi Jurnal Orang Kerja. Mungkin ini yang bisa disebutkan untuk menyebut ke mana arah gerak Jurnal ini.

Sebab kemiskinan dan ketidakadilan struktural sangat mungkin memicu konflik sosial dengan menggunakan isu primordial, terutama berkaitan dengan politik identitas. Usaha menulis dalam jurnal ini merupakan usaha belajar bersama untuk lebih fokus pada persoalan yang dihadapi daripada saling menuding.

Usaha menyatukan langkah, pikiran dan kerja nyata ini merupakan jawaban yang bisa diberikan dari pinggiran untuk membangun Rumah Indonesia yang lebih baik, dengan sumbangan satu bata bata dari NTT. Sebab kompleksitas persoalan Indonesia harus lah diuraikan, dan tidak coba dijawab dengan logika totaliter. Dengan selalu menyebut satu jawaban untuk semua pertanyaan.

Jadi jika hari ini ada pertanyaan ‘*Quo Vadis 50 tahun NTT*’, maka jawabannya, ‘Hari ini kami mulai menulis, terus menulis dan membaca berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari’. Mungkin dengan cara ini rasa manusia bisa kita pertahankan, dan yang ‘biasa’ bisa diartikan tidak terbelakang, sambil tidak menutup mata bahwa kita memang harus belajar dari komunitas-komunitas lain dari berbagai belahan dunia.

## **Referensi**

Parera, A.D.M., *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor: Suatu Kajian Peta Politik Pemerintahan Kerajaan-Kerajaan di Timor sebelum Kemerdekaan RI*, Sinar Harapan: Jakarta, 1994.